



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

RENCANA KERJA

2026

**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BOGOR**



+62 888-0911-2569



sekretariat@bpbdkota
bogor@gmail.com



bpbd.kotabogor



bpbdkotabogor

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024	4
2.2 Anggaran dan Realisasi Tahun 2024	4
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6
B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	11
2.2 Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	18
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	33
3.2 Tujuan dan Sasaran BPBD Kota Bogor	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB V PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2024	4
Tabel 2. 2 Capaian Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....	6
Tabel 2. 3 Capaian Indikator Kinerja Program Penanggulangan Bencana Daerah	11
Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester 2	14
Tabel 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Semester I Tahun 2025 sampai dengan tahun 2026	18
Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
Tabel 2. 7 Usulan Musrenbang Yang Akan Diakomodir Dalam Renja Perangkat Daerah 2026	31
Tabel 2. 8 Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dprd Yang Akan Diakomodir Dalam Renja Perangkat Daerah 2026	32
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penannggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029	36
Tabel 4. 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kota Bogor Tahun 2025.....	40
Tabel 4. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Tahun 2026 merupakan dokumen penting yang disusun sebagai tindak lanjut sekaligus wujud implementasi dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Regulasi tersebut mengatur secara komprehensif mengenai tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah; tata cara evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); hingga tata cara perubahan baik pada RPJPD, RPJMD, maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, keberadaan Renja Perubahan BPBD Kota Bogor tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam mendukung konsistensi proses pembangunan daerah.

Tahun 2025 menjadi tahun transisi, dilaksanakan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2025–2029. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus disusun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah terpilih. Oleh karena itu, pada tahun 2025 disusun RPJMD Kota Bogor Tahun 2025–2029 sebagai pedoman arah pembangunan Kota Bogor untuk lima tahun mendatang.

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bogor 2025–2029. Dengan demikian, penyusunan RKPD Tahun 2026 akan mengacu pada Rancangan RPJMD Kota Bogor 2025–2029 serta Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya, RENJA BPBD Tahun 2026 disusun berpedoman pada RKPD 2026, Rancangan RPJMD Kota Bogor 2025–2029, serta Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029.

Rancangan RPJMD Kota Bogor Tahun 2025–2029 pada RENSTRA BPBD Kota Bogor ini memuat visi dan misi Wali Kota Bogor yakni pada misi “Bogor Cerdas” dan “Bogor Sehat” di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2025–2029.

Berdasarkan tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, dokumen Renja 2026 BPBD Kota Bogor memiliki fungsi strategis sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan. RKA ini kemudian akan digunakan dalam tahapan penganggaran. Dengan demikian, Renja BPBD Kota Bogor Tahun 2026 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan dan penganggaran daerah yang keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang penanggulangan bencana

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor tahun 2026 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
3. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
5. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Kabupaten/Kota.
6. Kepmendagri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024.
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bogor.
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Bogor Nomor 165 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2026 untuk memberikan gambaran tentang rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor selama Tahun 2026 berupa penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Sekaligus menjadi pedoman arah untuk dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 1 periode.

Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2026 sesuai dengan rencana agar tujuan dan sasaran dapat tercapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja-SKPD Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024
- 2.2 Anggaran dan Realisasi Tahun 2024
 - A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
- 2.2 Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor
- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran BPBD Kota Bogor

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2024 hingga Tahun berjalan 2025 menjadi landasan penting dalam penetapan target Renja Tahun 2026. Melalui evaluasi tersebut, diperoleh berbagai informasi yang bermanfaat sebagai dasar dalam merumuskan strategi serta menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Renja BPBD Tahun 2026.

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2024, melalui 2 (dua) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 7 (tujuh) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 7,865,613,987,- dan Program Penanggulangan Bencana 3 (tiga) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 1,267,633,400,- total anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 9,133,247,387.- atau dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tercapai realisasi keuangan sebesar Rp. 8,518,977,715,- atau 93.27%.

2.2 Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 2. 1
Aanggaran dan Realisasi Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	PROGRAM
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,629,600	2,300,000	2,329,600	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,717,426,027	3,717,210,095	215,932	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	44,400,000	44,400,000	0	
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	220,103,700	209,339,110	10,764,590	
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,915,100.00	8,383,600	531,500	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	66,713,100	52,365,600	14,347,500	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17,269,100	12,495,000	4,774,100	

8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116,603,800	85,472,800	31,131,000	
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26,822,600	8,790,600	18,032,000	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000	11,940,000	80,000	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262,740,000	167,398,709	95,341,291	
12	Pengadaan Mebel	89,439,900	88,178,400	1,261,500	
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105,091,100	98,768,060	6,323,040	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	140,085,000	136,665,363	3,419,637	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,025,811,360	1,978,349,374	47,461,986	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42,090,000	37,022,665	5,067,335	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	646,802,000	378,432,123	268,369,877	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90,985,600	72,490,249	18,495,351	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227,686,000	226,126,557	1,559,443	
TOTAL		7,865,613,987	7,336,128,305	529,505,682	
CAPAIAN ANGGARAN : 93.27%					
20	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana Kabupaten/Kota	250,853,500	230,539,500	20,314,000	PENANGGULANGAN BENCANA
21	Pengendalian Operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	196,692,000	194,000,000	2,692,000	
TOTAL		447,545,500	424,539,500	23,006,000	

CAPAIAN ANGGARAN : 94.86%				
22	Kooordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	21,000,000	21,000,000	0
TOTAL		21,000,000	21,000,000	0
CAPAIAN ANGGARAN : 100%				
23	Pencarian, Pertolongan dan evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	196,973,800	181,297,700	15,676,100
24	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	602,114,100	556,012,210	46,101,890
TOTAL		799,087,900	737,309,910	61,777,990
CAPAIAN ANGGARAN : 92.27%				
TOTAL KESELURUHAN		9,133,247,387	8,518,977,715	614,289,672
CAPAIN KESELURUHAN ANGGARAN : 93.27%				

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian sasaran dalam meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang efektif efesien serta akuntabel di lingkup perangkat daerah didukung oleh program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun pencapaian target Indikator kinerja pada sasaran program dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Capaian Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Capaian 2024
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A Poin	BB Poin
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	3,55 Poin	3,54 Poin

Dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2024, memiliki alokasi anggaran sebesar 7,865,613,987, dengan realisasi sebesar 7,336,128,305 , yang

diintervensi 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. . Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disusun secara sistematis, menyeluruh, serta selaras dengan arah pembangunan daerah. Proses penyusunan dokumen tersebut berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama satu tahun anggaran. (output) yang dihasilkan berupa terpenuhinya hak gaji dan tunjangan ASN.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan tahunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor. Hasil (output) yang diperoleh dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan Tahun 2024.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian dinas lapangan (PDL) bagi pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor sebagai bagian dari kelengkapan seragam kedinasan. Output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini

adalah tersedianya pakaian dinas lapangan (PDL) lengkap dengan atributnya bagi pegawai BPBD Kota Bogor.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan perkantoran diBPBD Kota Bogor. Kegiatan ini difokuskan pada penyediaan kebutuhan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor sebagai sarana penunjang kegiatan.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan ini bertujuan menyediakan kebutuhan alat tulis dan perlengkapan kantor sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas administrasi.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mendukung kebersihan, kenyamanan, dan kerapihan lingkungan kerja. Kegiatan ini mencakup penyediaan berbagai kebutuhan rumah tangga kantor, seperti sabun, sabun pel, serta peralatan kebersihan lainnya yang digunakan dalam aktivitas pemeliharaan gedung dan ruang perkantoran

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, bertujuan untuk pemenuhan bahan logistik kantor untuk menunjang pelaksanaan Tugas BPBD Kota Bogor.

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan untuk

memenuhi kebutuhan cetak-mencetak dan penggandaan dokumen pada perkantoran. Kegiatan ini mencakup penyediaan berbagai jenis barang cetakan, antara lain spanduk

- f. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan informasi, pengetahuan, serta referensi.
- g. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan dengan tujuan memfasilitasi penyelenggaraan berbagai rapat, seperti rapat koordinasi, konsultasi, maupun diskusi yang dilaksanakan di luar kantor. Pelaksanaan rapat tersebut memiliki peran penting karena substansi yang dibahas dapat menjadi sumber referensi, data, informasi, serta masukan atau saran dalam mendukung pelaksanaan tugas. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup fasilitasi undangan rapat yang diselenggarakan di luar Kota Bogor sebagai sarana penambahan wawasan dan peningkatan pengetahuan bagi perangkat daerah.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. **Pengadaan Mebel**
Sub kegiatan Pengadaan Mebel merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan menyediakan perabot yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi perkantoran maupun operasional lapangan. Kegiatan ini meliputi pengadaan tempat tidur barak yang diperuntukkan bagi kebutuhan personel dalam penanganan bencana, serta kursi rapat yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi maupun kegiatan kedinasan lainnya.
- b. **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan menyediakan fasilitas pendukung bagi kelancaran operasional perkantoran.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik merupakan kegiatan rutin tahunan yang bersifat wajib dan mengikat, sehingga setiap tahun harus dialokasikan sesuai kebutuhan organisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan layanan komunikasi, air, dan listrik sebagai kebutuhan dasar yang diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada BPBD.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pegawai Non-ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan ini mencakup penyediaan tenaga pendukung, baik petugas Tim Reaksi Cepat maupun tenaga administrasi, yang berperan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas maupun Kendaraan Dinas Jabatan merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan untuk memastikan kendaraan dinas tetap terpelihara dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung tugas kedinasan. Bentuk pemeliharaan yang dilakukan meliputi penyediaan biaya bahan bakar (BBM), pelaksanaan servis berkala, penggantian suku cadang, serta pembayaran perpanjangan STNK.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan fungsi kendaraan dinas operasional agar selalu dalam kondisi baik, layak pakai, dan siap digunakan kapan saja. Kegiatan ini sangat penting karena kendaraan dinas lapangan merupakan sarana utama dalam mendukung mobilitas pegawai, terutama dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, koordinasi lapangan, serta kegiatan kedinasan lainnya yang memerlukan kecepatan dan ketepatan respons.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan dengan tujuan menjaga dan merawat peralatan serta mesin kantor agar tetap berfungsi dengan baik. Pemeliharaan secara berkala ini sangat penting sebagai sarana pendukung dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan aktivitas perkantoran.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan dengan tujuan menjaga kondisi gedung kantor BPBD agar senantiasa terpelihara dengan baik. Melalui kegiatan ini, dilakukan upaya pemeliharaan dan perawatan gedung

B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Pada RPJMD Tahun 2019-2024, BPBD Kota Bogor berperan dalam mendukung Walikota Bogor untuk mencapai Misi 3 yang mewujudkan Kota Bogor yang sejahtera . Berikut merupakan Indikator Kinerja Sasaran BPBD Kota Bogor pada tahun 2024 yang dilaksanakan untuk menggapai capaian kinerja sasaran RPJMD 2019-2024 untuk mendukung Walikota Bogor dalam melaksanakan Visi dan Misi.

Tabel 2. 3
Capaian Indikator Kinerja Program Penanggulangan Bencana Daerah

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Capaian 2024
	Pelayanan Informasi Kebencanaan yang	100%	100%

Program Penanggulangan Bencana	Tersampaikan ke Masyarakat		
	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Penanganan	100%	100%
	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana	50%	36.76%
	Persentase Sekolah Aman Bencana	10.5%	16.38%

Dalam pelaksanaan program tersebut diatas, diintervensi oleh 3 (tiga) Kegiatan dan 5.(lima) Sub Kegiatan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Pada sub kegiatan ini adanya anggaran yang dialokasikan untuk anggaran honorarium tenaga non ASN dan kebutuhan lainnya di sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.250,853,500 ,-. Output yang dihasilkan berupa pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) yang sudah terealisasi semenjak tahun 2016 hingga kini dengan total 25 kelurahan dari 68 jumlah kelurahan di kota bogor,
- b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Pada sub kegiatan ini output yang dihasilkan ialah dokumen pembelian alat pengadaan Mesin Fogging (Minyak Solar/Water Base, Pengasapan dan ULV) dengan jumlah 10 Unit .Mesin Foging ini telah beroperasi lalu diserahkan kepada masyarakat Kota Bogor dan telah mencapai kinerja 100%.

2. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- a. Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/**Kota**
Pada sub kegiatan ini menghasilkan sebuah kajian kebutuhan pasca bencana yang dihasilkan melalui layanan jasa studi penelitian dan bantuan teknik.

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- a. Pencarian dan pertolongan dan evakuasi korban bencana
Pada sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah presentanse jumlah korban yg berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi perjenis kejadian bencana, dalam sub kegiatan ini melaksanakan belanja-belanja mesin yakni alat Bantu SAR antara lain Peralatan seperti gergaji tenda pleton, tangga teleskopik, tali karmantel, tabung selam, baju selam, dan full body harness. Sehingga dapat membantu dalam melakukan evakuasi dan penyelamatan korban bencana. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 100% yang diperuntukan sebagai pelayanan dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Berikut rekapitulasi kejadian bencana yang terjadi selama tahun 2024 di Kota Bogor.

b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Rincian kegiatan yang tertuang dalam sub kegiatan ini adalah pengadaan logistik yang disediakan untuk diserahkan kepada masyarakat yang terdampak bencana, hal itu terdiri dari terpal sebanyak 156 lembar dan Tandu lipat sekaligus dengan roda sebanyak 4 Unit, serta penyediaan hunjara (hunian sementara) sebanyak 122 dalam 1 (satu) tahun untuk korban bencana di Kota Bogor dengan capaian kinerja 100%.

Evaluasi capaian kinerja 2024 dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pencapaian Renstra BPBD Kota Bogor Tahun 2024 dan Tahun 2025 Semester 2

NSPK Dan Sasara n RPJMD Yang Releva n	Tujua n	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n (2024)	Tahun 2025		Realisasi Triwulan 2 Tahun 2025
								Targe t	Rp (dlm juta)	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13
				Program 1 : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7,370,414,644	3,019,797,09 2
				Kegiatan 1 :						
			1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	4	6	7,000,000	N/A
				Sub Kegiatan:						
			1.05.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	5	7,000,000	N/A
				Kegiatan 2 :						
			1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan adminsitrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	Persentas e	89%	100%	3,772,804,74 8	1,794,125,57 7
				Sub Kegiatan:						
			1.05.01.2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	18 Orang/ Bulan	19	3,719,524,74 8	1,767,485,57 7
				Sub Kegiatan:						
			1.05.01.2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Laporan	12	12	53,280,000	26,640,000
				Kegiatan 4 :						
			1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	Persentas e	100%	100%	N/A	N/A
				Sub Kegiatan:						

			1.05.01.2.05.000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	8	N/A	N/A	N/A
				Kegiatan 5 :						
			1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	Persentase	100%	100%	381,955,200	69,244,811
				Sub Kegiatan :						
			1.05.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	9,908,400	N/A
				Sub Kegiatan :						
			1.05.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket dan Peralatan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	41,740,750	5,044,000
				Sub Kegiatan :						
			1.05.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	21,275,900	N/A
				Sub Kegiatan :						
			1.05.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	143,657,600	39,789,500
				Sub Kegiatan :						
			1.05.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	15,679,650	1,365,000
				Sub Kegiatan :						
			1.05.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	6	13,946,400	5,970,000
				Sub Kegiatan :						
			1.05.01.2.06.000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	135,746,500	17,076,311
				Kegiatan 6 :						
			1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	Persentase	100%	100%	301,718,400	0
				Sub Kegiatan :						
			1.05.01.2.07.000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	1	199,859,200	0
				Sub Kegiatan :						
			1.05.01.2.07.001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Unit	14	1	101,859,200	0

					Bangunan Lainnya yang Disediakan					
				Kegiatan 7 :						
			1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Laporan	12	12	2,140,883,560	1,055,792,211
				Sub Kegiatan :						
			1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	140,085,000	52,681,665
				Sub Kegiatan :						
			1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	2,000,798,560	1,003,110,546
				Kegiatan 8 :						
			1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	12	766,052,736	100,634,493
				Sub Kegiatan :						
			1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	38,330,000.00	8,100,158
				Sub Kegiatan :						
			1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	17	649,972,238.00	91,359,335
				Sub Kegiatan :						
			1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		42	77,750,498	1,175,000
				Program 2 :					1,713,049,870	92,854,500
				Kegiatan						
		#SPMPrioritas	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah sarana yang diterima masyarakat untuk mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase	100	100	1,036,539,020	17.654.500
					Persentase Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Persentase	100	100		
				Sub Kegiatan :						
		#SPMPrioritas	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun	Unit	N/A	123	701,879,300.00	N/A

				Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana dikawasan tempat tinggalnya					
				Sub Kegiatan :						
		#SPMPrioritas	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	350	500	9,406,180.00	8,584,500
				Sub Kegiatan :						
		#SPMPrioritas	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	2	5	325,253,540.00	9,070,000
				Kegiatan 3 :						
		#SPMPrioritas	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jiwa yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase	100	100	606,514,850	70,500,000
				Sub Kegiatan :						
		#SPMPrioritas	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	4830	5088	50,000,000.00	3,100,000
				Sub Kegiatan :						
			1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	2500 Jiwa	3,000	556,514,850	67,400,000
				Kegiatan 4 :						
			1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan	Persentase		100	69,996,000.00	4,700,000
				Sub Kegiatan :						
			1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana disemua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana(R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	207	198	69,996,000.00	4,700,000

2.2 Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor

Penyelenggaraan pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor dilaksanakan dengan mengemban fungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus sebagai lembaga teknis yang bertanggung jawab dalam urusan kebencanaan di wilayah Kota Bogor. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Bogor berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 serta Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan BPBD. Selain itu, landasan hukum lainnya yang menjadi acuan adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Analisis kinerja pelayanan BPBD Kota Bogor dilakukan berdasarkan kajian terhadap capaian kinerja yang diukur melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 5
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Semester I Tahun 2025 sampai dengan tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Target Awal	Target Kesepakatan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target
1	Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	83,2	83,2	71,69	75,15	Hasil Pengukuran di Akhir Tahun	80,90
2	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	95	95	N/A	N/A	Hasil Pengukuran di Akhir Tahun	N/A
3	Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persen	91	100	100	100	Hasil Pengukuran di Akhir Tahun	100
4	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	88,75	85,70	88.89	85,62	Hasil Pengukuran di Akhir Tahun	N/A
5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi	Inovasi	1 inovasi	1 inovasi	NA	NA	Hasil Pengukuran di Akhir Tahun	1

	inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi 100)							
6	Indeks Risiko Bencana Daerah	Poin	0,79	58.03	63.49	58,03	Hasil Pengukuran di Akhir Tahun	N/A

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD, yang merujuk pada visi dan misi Wali Kota tahun 2025-2029, maka diperoleh isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kota Bogor, yaitu :

- 1 Penguatan integrasi dokumen perencanaan penanggulangan bencana seperti RPB, KRB, dan dokumen kontinjensi ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
- 2 Penguatan sinergisitas dan koordinasi lintas sektor antara BPBD, perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berbasis kolaborasi dan gotong royong.
- 3 Penguatan telaah risiko bencana dalam proses perencanaan pembangunan Kota Bogor, sehingga setiap program/kegiatan pembangunan lebih memperhatikan aspek kerentanan wilayah
- 4 Optimalisasi kualitas perencanaan melalui penguatan kompetensi SDM, penyediaan infrastruktur penunjang, serta pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor sebesar 12,934,200,728.00, yang terdiri dari 2 Program, 12 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Setelah dilakukan penetapan pagu indikatif kembali, Pagu Indikatif BPBD sebesar Rp. 10.112.633.810,00, yang terdiri dari 2 Program, 12 kegiatan dan 36 , Berikut Rincian Tabel, dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal						Hasil Kebutuhan					
No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			12,934,200,728.00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			10.112.633.810,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12,934,200,728.00			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.112.633.810,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			12,934,200,728.00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10.112.633.810,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	83,3 Nilai	10,085,982,148	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.90 Nilai	7.655.018.884,00	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal
		TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN	100%					Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	100 Persen		
		Nilai Hasil SURVEY KEPUASAN	85.80 Nilai					Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	87.62 Nilai		
		Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	1					Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan Setiap Tahun	1 Inovasi		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan PD secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	100 Persen	10,800,000	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100 Persen	4.000.000,00	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal
								Persentase Realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	100 Persen		
								Persentase Realisasi anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	100 Persen		

1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5,000,000		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	2.000.000,00	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	5,800,000		1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2.000.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100 Persen	4,621,017,748	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	100 Persen 100 Persen	3.831.336.990,00	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/Bulan	4,525,497,748		2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	3.736.896.990,00	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	95,520,000.00		2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	94.440.000,00	

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100 Persen	8,000,000	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen	939.150,00	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	8,000,000		3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	939.150,00	
4	Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100 Persen	320,000,000	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	137.150.000,00	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	320,000,000		4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	137.150.000,00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persen	768,609,000	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100 Persen	554.869.800,00	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000		5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.602.800,00	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket dan Peralatan Kantor yang disediakan	1 Paket	70,000,000		5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket dan Peralatan Kantor yang disediakan	1 Paket	34.418.600,00	

5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19,500,000		5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	38.700.700,00	
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	214,109,000		5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	198.859.200,00	
5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20,000,000		5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.594.500,00	
5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	12,000,000		5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	-	
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	423,000,000		5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	249.694.000,00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100 Persen	567,470,400	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD	100 Persen	118.069.517,00	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal
6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	77,076,000		6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	N/A	
6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	120,000,000		6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	20.702.000,00	

6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	100,394,400		6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	68 Unit	97.367.517,00	
6.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200,000,000		6.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	
6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	70,000,000		6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	N/A	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	2,370,085,000	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.140.393.656,00	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	170,085,000		7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	161.771.176,00	
7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,200,000,000		7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.978.622.480,00	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100 Persen	1,420,000,000	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	100 Persen	868.259.771,00	Kel. Kayumanis, Kec. Tanah Sareal

	han Daerah										
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40,000,000		8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.330.000,00	
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	750,000,000		8.2	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan dinas Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	649.931.102,00	
8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	67 Unit	300,000,000		8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	179.998.669,00	
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180,000,000		8.4	Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	3 Unit	150,000,000		8.5	Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	N/A	

	Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/ Direhabilitasi					atau Bangunan Lainnya				
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA)	45.59%	2,848,218,580	Kota Bogor		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Kelurahan tangguh bencana	47.06 Persen	2.457.614.926,00	Kota Bogor
		Persentase Sekolah Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	1,15 %					Persentase SPAB	0.57 Persen		
		Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana	100%					Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana	100 Persen		
								Persentase ketersediaan data kelurahan yang berada di kawasan berisiko bencana tinggi	21.43 Persen		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota	Persentase Warga yang telah mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana	100%	89,560,000.00	Kota Bogor	9	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota a	Persentase Warga yang telah mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana	100 Persen	85.055.000,00	Kota Bogor
		Sekolah (SD,SMP,TK)	900 Orang	89,560,000.00	Sekolah (SD,SM P,TK)	9.1	Sosialisasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi,komunikasi,informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	900 Orang	85.055.000,00	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah sarana yang diterima masyarakat untuk mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1,616,122,478.00	Kawasan Rawan Bencana di	10	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sarana yang diterima masyarakat untuk mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	1.155.986.401,00	Kawasan Rawan Bencana di

	Terhadap Bencana	Persentase Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%%		Kota Bogor			Persentase Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100 Persen		Kota Bogor
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana dikawasan tempat tinggalnya	375	561,847,500.00	Kawasan Rawan Bencana di Kota Bogor	10.1	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana dikawasan tempat tinggalnya	369 Unit	498.414.500,00	Kawasan Rawan Bencana di Kota Bogor
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	800 Orang	18,919,578.00	Balai Kota Bogor	10.2	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	800 Orang	17.039.701,00	Balai Kota Bogor
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	27 Kawasan	43,725,000.00	Kelurahan yang berada di Kota Bogor dan yang telah terbentuk KELTANA	10.3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	27 Kawasan	42.525.000,00	Kelurahan yang berada di Kota Bogor dan yang telah terbentuk KELTANA

	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TimReaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	55 Orang	324,650,000	Kota Bogor	10.4	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TimReaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	55 Orang	142.380.000,00	Kota Bogor
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	184,000,000	Kota Bogor	10.5	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	N/A	Kota Bogor
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5	482,980,400.00	Keluurahan/Kecamatan di Kota Bogor	10.6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5 Kawasan	455.627.200,00	Keluurahan/Kecamatan di Kota Bogor
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jiwa yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	770,753,102.00	Kota Bogor	11	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jiwa yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Persen	746.009.925,00	Kota Bogor
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2	2,250,000.00	Kota Bogor	11.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2	2.247.200,00	Kota Bogor

	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	5330 Orang	79,320,000.00	Kota Bogor	11.2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	360 Orang	55.320.000,00	Kota Bogor
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3100 Orang	687,383,102.00	Kota Bogor	11.3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3100 Orang	686.665.525,00	Kota Bogor
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,800,000.00	Kota Bogor	11.4	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.777.200,00	Kota Bogor
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan	100%	371,783,000		12	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan	100 Persen	470.563.600,00	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		1	100,000,000.00		12.1	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		N/A	N/A	
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	70	133,840,000.00		12.2	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	70 Orang	133.840.000,00	

	Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten /Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana disemua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana(R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1	38,920,000.00		12.3	Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana disemua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana(R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	122.000.000,00	
	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	1	49,127,000.00		12.4	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	12 Laporan	164.911.800,00	
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana(R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana(R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1(satu) tahun	1	49,896,000.00		12.5	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana(R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana(R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1(satu) tahun	1 Dokumen	49.811.800,00	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2026 terdapat usulan yang di tujukan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor baik pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang maupun Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bogor. Hal ini Dapat Dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 7
Usulan Musrenbang Yang Akan Diakomodir Dalam Renja Perangkat Daerah 2026

Nama Pengusul	Uraian Usulan	Alamat	Rt	Rw	Volume	Satuan	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
Rw. 04 Panaragan Aspol	Penguatan Kapasitas Kawasan	Jl. Panaragan Aspol Rw.04	01	04	15	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
Karang Taruna Lubuk Sipatahunan	membutuhkan HT (4 buah), Jas Hujan (25 buah), Sepatu Booth (25 buah), Senter (10 buah), Senso (2 buah), Sarung Tangan (25 buah)	Jl Sempur No 33	03	01	91	Buah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana kab/kota
Edwar Mulyadi	Pengadaan alat telekomunikasi handy talkie	Kp. Sukawarna	02	10	25	Buah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana kab/kota
Kelurahan Kebon Pedes	Kelurahan Tangguh Bencana	Jl. Pondok Rumput	04	11	22	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana kab/kota
Kelurahan Kebon Pedes	perlunya chainsaw 2 unit, pelampung 12 set dan alat komunikasi 6 unit	Jl. Pondok Rumput	04	11	20	Buah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana kab/kota
UJANG SUKARMA	Kelurahan tangguh bencana	Kelurahan Tajur	02	05	22	orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

								bencana kab/kota
ANWAR SUHENDAR	agar Warga Rw 08 tau dalam soal kebencanaan	Kp. Salabenda Got Rt 03 Rw 08 Kelurahan Curug Kecamatan Bogor Barat	3	8	15	Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

Tabel 2. 8
Usulan Pokok-Pokok Pikiran Dprd Yang Akan Diakomodir Dalam Renja Perangkat Daerah 2026

No	Kamus	Status	Nama Pengusul	Perangkat Daerah	Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Barang	Sub Kegiatan
1.	Penyediaan Prasarana Penanggulangan Bencana dan fasilitas penunjang (rambu kebencanaan, alat peringatan dini banjir, ringboy/pelampung, alat komunikasi, chainsaw, tandu lipat, dan prasarana lain untuk penanggulangan bencana) Unit	Usulan disetujui	Said Muhamad Mohan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. SIRNASARI RW 04 KEL. EMPANG, BOGOR SELATAN	Kelurahan Empang	Bogor Selatan	Chainsaw 16 Unit	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana kab/kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Periode lima tahun ini menjadi tahap awal yang sangat penting dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, yang dikenal sebagai Visi Indonesia Emas 2045. Tahapan pertama RPJPN ini memegang peranan strategis karena akan menjadi fondasi bagi pembangunan nasional pada periode-periode selanjutnya.

Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, pemerintah menetapkan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yaitu delapan cita-cita utama yang menjadi pedoman dalam mewujudkan visi pembangunan Indonesia. Salah satu prioritas penting yang termasuk di dalamnya adalah penanggulangan bencana yang masuk pada Asta Cita ke-8 yakni

”Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur”

Program kerja yang ke-8 mempunyai komitmen untuk memberikan jaminan keamanan untuk beribadah, pengutamaan lingkungan alam, dan melestarikan budaya, dengan cara:

Penanganan Bencana

1. Meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana.
2. Memperkuat sistem deteksi bencana (early warning system) dengan penerapan teknologi terkini.
3. Meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.
4. Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.
5. Menata koordinasi antarlembaga terkait untuk mempercepat penanggulandangandanpenanganan bencana.
6. Mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana.
7. Menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana.

Adapun Visi BNPB Tahun 2025-2029

“Mewujudkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang Kolaboratif untuk membangun Resiliensi Bangsa Menghadapi Bencana Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Untuk mencapai visi tersebut, BNPB merumuskan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan pengelolaan risiko bencana dalam pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terkoordinasi dan terpadu
3. Meningkatkan kualitas SDM penanggulangan bencana yang professional
4. Meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan BNPB yang transparan dan akuntabel

Strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi di setiap bidang yang selaras dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029. Dalam konteks ini, BPBD Provinsi Jawa Barat maupun BPBD Kota Bogor memiliki tujuan dan sasaran yang sejalan, yaitu menurunkan tingkat risiko bencana di daerah. Adapun indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

3.2 Tujuan dan Sasaran BPBD Kota Bogor

Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025–2029 merupakan kondisi ideal yang hendak diwujudkan melalui proses pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun, mulai 2025 hingga 2029. Sementara itu, sasaran dimaknai sebagai rumusan capaian yang merefleksikan terwujudnya tujuan tersebut, yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari keberhasilan pelaksanaan program perangkat daerah.

Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat dinilai serta dievaluasi melalui indikator yang telah ditetapkan. Indikator berperan sebagai instrumen pengukur kinerja atas pelaksanaan suatu kegiatan, program, sasaran, maupun tujuan, baik dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), maupun dampak (impact). Pada bagian ini, indikator difokuskan sebagai alat ukur pencapaian kinerja dari sisi hasil (outcome) dan dampak (impact). Keberadaan indikator juga memberikan batasan dan arah yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pemanfaatan sumber daya dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, proses perumusan tujuan, sasaran, dan indikator menjadi tahapan yang sangat strategis serta menjadi fondasi utama dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara komprehensif.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2025–2029 sekaligus menjawab berbagai isu serta permasalahan di bidang perencanaan pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor menetapkan 1 Tujuan utama dan 5 Indikator Sasaran Perangkat Daerah .

TUJUAN 1 : Terwujudnya penurunan resiko bencana daerah, Indikator kinerja tujuan ditetapkan sebagai berikut Adapun indikator kinerja tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, pencapaiannya diperkuat melalui penetapan sasaran sebagai berikut:

SASARAN 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah berikut indikator kinerja pada sasaran 1 yakni :

1. Predikat SAKIP Perangkat Daerah;
2. Persentase tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/ITDA;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah;
4. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100.

1. Indeks Risiko Bencana

Upaya mewujudkan tujuan yang telah direncanakan diperkuat melalui penetapan sejumlah sasaran yang berfungsi sebagai arah dan tolok ukur pencapaian, sebagai berikut

1. Indeks Ketahanan Daerah

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penannggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029

No	NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
1	Sasaran RPJMD: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Serta Menguatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah			IK Sasaran RPJMD: SAKIP Tingkat Kota	Predikat	BB (78,29)	BB (79,6)	A (80,01)	A (80,65)	A (81,15)	A (81,5)	A (82)
		Tujuan : Terwujudnya penurunan risiko bencana		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	79.27	80	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5
			Sasaran: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai (poin)	BB (75.15)	A (80.85)	A (80.90)	A (80.95)	A (81.00)	A (81.05)	A (81.1)

			lingkungan Perangkat Daerah									
2	Sasaran RPJMD: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Serta Menguatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah			Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Terwujudnya penurunan risiko bencana daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	79.27	80	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5
			Sasaran: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk/Itda	Persen	100	100	100	100	100	100	100

3	Sasaran RPJMD: Meningkatkan kualitas pelayanan publik			Indeks pelayanan Publik	Indeks	4.65	4.65	4,66	4.67	4.68	4.69	4.7
		Terwujudnya penurunan risiko bencana daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	79.27	80	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5
			Sasaran: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	3.54	3.58	3.62	3.66	3.70	3.74	3.78
				Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Inovasi	N/A	1	1	1	1	1	1
4	Sasaran RPJMD: Menurunnya Risiko Bencana di seluruh wilayah			IK : Indeks Risiko Bencana	Poin	58,03	58,03	58,02	58,02	58,01	58,01	58,00

		Tujuan: Terwujudnya penurunan risiko bencana daerah		IK : Indeks Risiko Bencana	Poin	58,03	58,03	58,02	58,02	58,01	58,01	58,00
			Sasaran : Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanggulan n bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,76	0,76	0,77	0,77	0,78	0,78	0,79

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2026 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka diperlukan perumusan program dan kegiatan yang lebih terarah dan terukur. Program dan kegiatan tersebut disusun beserta indikator kinerjanya, sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan di bidang penanggulangan bencana. Melalui penyusunan program dan kegiatan ini, diharapkan setiap langkah yang dilaksanakan pada tahun 2026 tidak hanya selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana, memperkuat kesiapsiagaan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih optimal. Adapun program, kegiatan, dan indikator yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kota Bogor Tahun 2026

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan Setiap Tahun
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu
	Persentase Realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah
	Persentase Realisasi anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu
	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket dan Peralatan Kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan sesuai RKBMD
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase SPAB
	Persentase Kelurahan tangguh bencana
	Persentase logistik dan peralatan yang terpenuhi dalam penanganan bencana
	Persentase ketersediaan data kelurahan yang berada di kawasan berisiko bencana tinggi
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga yang telah mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana
Sosialisasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi,komunikasi,informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sarana yang diterima masyarakat untuk mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Persentase Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara,Keluarga,maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana dikawasan tempat tinggalnya
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan daruratbencana (per jenisancaman) Kabupaten/Kota

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TimReaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untukpenangananawal darurat bencana
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jiwa yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK PenetapanStatus Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat
Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen Data dan Informasi Kebencanaan yang Tersampaikan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi
Koordinasi penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana disemua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana(R3P)
Fasilitasi pengumpulan data penduduk didaerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah didaerah rawan bencana
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana(R3P)Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana(R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1(satu) tahun

Tabel 4. 2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 202G		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2					3	4		5	6					7	8	9			10	11
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						10.112.633.810,00								11.934.358.576,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.112.633.810,00							11.934.358.576,00		
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.112.633.810,00							11.934.358.576,00		
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN JUMLAH INOVASI YANG DIBANGUN/DIKEMBANGKAN SETIAP TAHUN NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH NILAI HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	-			100 Persen 1 Inovasi 80.90 Nilai 87.62 Nilai	7.655.018.884,00					-	9.248.555.748,00			
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	-			100 Persen	4.000.000,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	11.300.000,00		
							Persentase Realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah				100 Persen										
							Persentase Realisasi anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah				100 Persen										
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	2.000.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar				12 Laporan	2.000.000,00	Kota Bogor,	PENDAPATAN ASLI	-	Penguatan Pendidikan,	-		5.800.000,00	BADAN PENANGGULAN	

							Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)		Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani				GAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	-			100 Persen	3.831.336.990,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	5.428.470.748,00	
							Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA				100 Persen									
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	3.736.896.990,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		5.331.470.748,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	94.440.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		97.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			100 Persen	939.150,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	8.000.000,00	

	1	0	0	2.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	939.150,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Tanah Sareal Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		8.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	137.150.000,00			-	-	-	-	200.000.000,00	
	1	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	137.150.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		200.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	-			100 Persen	554.869.800,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	637.000.000,00	
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.602.800,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	34.418.600,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas	-		71.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

																elayanan publik yang bersih dan melayani				
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	38.700.700,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaa n, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	198.859.200,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaa n, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		210.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							0				0 0	15.594.500,00	-	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaa n, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		21.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	249.694.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaa n, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		275.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan	-			100 Persen	118.069.517,00			-	-	-	-	148.700.000,00	

						Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemerintahan sesuai RKBM													
	1	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	20.702.000,00	-	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		130.000.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				68 Unit	97.367.517,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaa n, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		17.500.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaa n, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		1.200.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	2.140.393.656, 00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaa n, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	2.270.085.000, 00	
	1	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	161.771.176,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaa n, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang	-		170.085.000,00	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

															bersih dan melayani				
	1	0 5	0 1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.978.622.480, 00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		2.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah Berkondisi Baik	-		100 Persen	868.259.771,00			-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-	-	545.000.000,00	
	1	0 5	0 1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 Unit	38.330.000,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	649.931.102,00	Kota Bogor, Tanah Sareal, Kayu Manis	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga, Pemuda dan kualitas pelayanan publik yang bersih dan melayani	-		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	179.998.669,00	Kota Bogor, Tanah Sareal,	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Pendidikan, Kebudayaan, Keluarga,	-		320.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

							yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana									berbasis mitigasi bencana				
	1	0	0	2.0	001	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				369 Unit	498.414.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-		419.030.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	001	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
							0				0 0	17.039.701,00	Kota Bogor, Bogor Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-		18.919.578,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	002	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				27 Kawasan	42.525.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-		50.125.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	002	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				55 Orang	142.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-		349.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				5 Kawasan	455.627.200,00	Kota Bogor, Bogor Timur, Tajur Kota Bogor, Bogor Utara, Semua	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan transportasi dan penguatan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana	-		500.188.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja BPBD Tahun 2026 merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis dan Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Penyusunan Renja Tahun 2026 memiliki arti penting karena menjadi pedoman dalam penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan pada tahun berjalan. Dokumen ini sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja BPBD, baik dalam aspek perencanaan maupun implementasi. Perubahan Renja ini berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi, yang tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk masyarakat. Dengan adanya dokumen ini, capaian program BPBD dapat dievaluasi secara terukur serta dipertanggungjawabkan.

Kepala Pelaksana,



Dimas Tiko Prahadisasonko, S.STP., M.Kesos.

Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 198501172003121001